

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA (Studi Pada BP4D Kabupaten Malaka)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pengukuran pencapaian kinerja instansi pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan dan mengoperasikan visi dan misi pemerintah. Keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari aspek kualitas kerja, produktivitas, dalam menggunakan layanan dari pemerintah. Suatu instansi pemerintah dikatakan berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun hasil maupun dampak dan pelaksanaan program masih dibawah standar cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi maka seluruh aktivitas tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* dari program akan tetapi lebih ditekankan pada keluaran proses manfaat dan dampak. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial dan untuk mengetahui pengaruh pemahaman *prinsip good governance* dan pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

Populasi dalam penelitian ini adalah 30 pegawai yang terdapat di BP4D kabupaten Malaka. Jumlah sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 30 pegawai. Penelitian ini bersifat kuantitatif data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner, dan diukur dengan skala ordinal. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis linear berganda.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan analisis statistik menggunakan spss versi 16 menunjukkan bahwa variabel pemahaman prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikan t yang diperoleh sebesar $0,023 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,416 > 2,052$ sehingga dapat dikatakan H_1 diterima. Yang artinya pemahaman prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kabupaten Malaka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemahaman prinsip *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Malaka berpengaruh positif apabila pemahaman prinsip *good governance* semakin baik maka kinerja instansi pemerintah (BP4D) Kabupaten Malaka semakin meningkat.

pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan hasil nilai signifikan t yang diperoleh sebesar $0,377 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,898 < 2,052$ maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh pada pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kabupaten Malaka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (BP4D) Kabupaten Malaka tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan yang artinya tidak terdapat pengaruh pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Bp4d) Kabupaten Malaka.

Atas hasil penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Malaka. sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan keilmuan yang kemudian dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya maka disarankan pengembangan dan perbaikan sistem kinerja, sehingga kinerja pemerintah lebih baik, dan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variasi faktor-faktor eksternal lain yang dapat diteliti selain faktor-faktor yang sudah digunakan selain faktor pemahaman prinsip *good governance* dan pengendalian inten dalam penelitian ini agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih objektif. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah penelitian tidak hanya di BP4D Kabupaten Malaka saja.